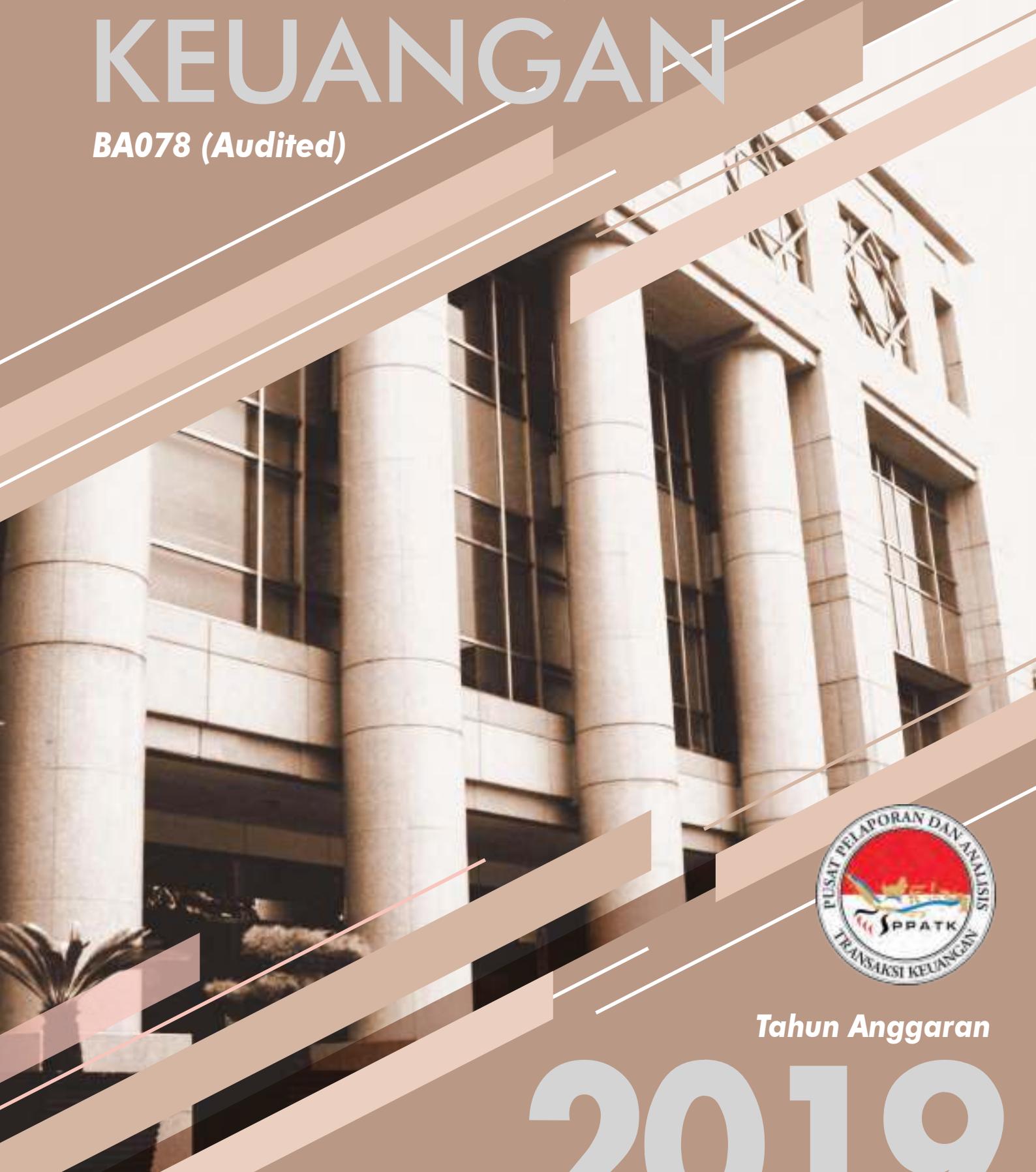


# LAPORAN KEUANGAN

**BA078 (Audited)**



*Tahun Anggaran*

# 2019

**PPATK**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

**AUDITED**

# **LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telepon +6221-3850455 +6221-3853922

Faksimili +6221-3856809 +6221-3856826

Website : [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

## Kata Pengantar

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 ini disusun dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 Berbasis Akrual (Audited) yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PPATK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance).

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 4 Mei 2020

Wakil Kepala



Dian Ediana Rae

## Daftar Isi

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vii
Ringkasan Laporan Keuangan .....	1
Laporan Realisasi Anggaran .....	5
Neraca .....	6
Laporan Operasional .....	7
Laporan Perubahan Ekuitas .....	8
Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
A.1. Dasar Hukum .....	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .....	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	12
A.4. Basis Akuntansi .....	13
A.5. Dasar Pengukuran .....	13
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
B.1. Pendapatan .....	22
B.2. Belanja .....	25
B.2.1. Belanja Pegawai .....	26
B.2.2. Belanja Barang .....	27
B.2.3. Belanja Modal.....	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	32
C.1. Aset Lancar .....	32
C.2. Aset Tetap .....	35
C.3. Aset Lainnya .....	44
C.4. Kewajiban .....	46
C.5. Ekuitas .....	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	57
F. Pengungkapan Lain-Lain .....	60

## Daftar Tabel dan Gambar

## Daftar Tabel

Tabel 1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	1
Tabel 2	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019.....	1
Tabel 3	:	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	2
Tabel 4	:	Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	3
Tabel 5	:	Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	3
Tabel 6	:	Penggolongan Kualitas Piutang .....	17
Tabel 7	:	Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap .....	19
Tabel 8	:	Perubahan DIPA PPATK Tahun 2019 .....	22
Tabel 9	:	Perubahan DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2019.....	22
Tabel 10	:	Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 .....	22
Tabel 11	:	Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	24
Tabel 12	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 .....	25
Tabel 13	:	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	25
Tabel 14	:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 .....	26
Tabel 15	:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018 .....	28
Tabel 16	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 .....	31
Tabel 17	:	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	33
Tabel 18	:	Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Lisensi Software Per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	34
Tabel 19	:	Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018 .....	35
Tabel 20	:	Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	35
Tabel 21	:	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2019 .....	37
Tabel 22	:	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 .....	38
Tabel 23	:	Penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 .....	39
Tabel 24	:	Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 .....	40
Tabel 25	:	Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 .....	42
Tabel 26	:	Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 .....	43
Tabel 27	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	44
Tabel 28	:	Rincian Aset Lainnya Tahun 2019 dan 2018 .....	45
Tabel 29	:	Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019 .....	45
Tabel 30	:	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 ....	46
Tabel 31	:	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	46
Tabel 32	:	Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	48
Tabel 33	:	Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 .....	49
Tabel 34	:	Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	51

## **Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

---

Tabel 35	:	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang Berakhir Desember 2019 dan 2018 .....	31	51
Tabel 36	:	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	.....	54
Tabel 37	:	Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.....	.....	54
Tabel 38	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 .....	.....	56
Tabel 39	:	Rincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019..	.....	58
Tabel 40	:	Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 .....	.....	62
Tabel 41	:	Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	.....	62
Tabel 42	:	Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	.....	62
Tabel 43	:	Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	.....	63

## Daftar Gambar

Gambar 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir  
31 Desember 2019 .....

25

## Daftar Lampiran

## Daftar Lampiran

1. Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga Per 31 Desember 2019.....	A
2. Neraca Tingkat Kementerian /Lembaga Per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	B
3. Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 .....	C
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 .....	D
5. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 .....	E
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 .....	F
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana/ Program/ Kegiatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 .....	G
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	H
9. Daftar Rekening Pemerintah .....	I
10. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainya dan Setara Kas .....	J
11. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	K
12. Nota Kesepakatan Asersi Final .....	L
13. Catatan Ringkas Barang Milik Negara .....	M
14. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2019 .....	N

## Pernyataan Tanggung Jawab



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN WAKIL KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Juwita 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826  
Email : contact.us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2020

Wakil Kepala

Dian Ediana Rae

## Ringkasan Laporan Keuangan

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 (Audited) ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK (BA 078) Tahun 2019 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited) Nomor NKF-078/63/PB.6/2020 tanggal 9 April 2020. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp673.487.690. Realisasi Belanja PPATK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp195.685.169.459 atau mencapai 92,54% dari alokasi anggaran sebesar Rp211.467.726.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1,

Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran  
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
Pendapatan	-	673.487.690	-	348.338.868
Belanja	211.467.726.000	195.685.169.459	92,54	137.888.656.568
Pembayaran	-	-	-	-

Pagu dan realisasi anggaran belanja PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menurut jenis belanja dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2  
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	% Realisasi
Pegawai	82.330.564.000	81.764.770.804	99,31
Barang	73.531.934.000	66.659.985.528	99,31
Modal	56.606.229.000	48.250.413.527	85,77
Jumlah	211.467.726.000	195.685.169.459	92,54

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 2018.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2019 dicatat dan dijelaskan sebesar Rp510.705.154.959 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.271.598.205, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp489.008.463.430 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp17.425.093.324.

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2018.

Nilai Kewajiban PPATK per 31 Desember 2019 sebesar Rp845.274.066 merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK per 31 Desember 2019 sebesar Rp509.859.880.893 merupakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2019.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3  
Ringkasan Neraca  
per 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Nama Perkiraan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	4.271.598.205	3.557.957.545	713.640.658	20,08
Aset Tetap	493.008.463.430	241.056.539.955	247.911.923.475	102,63
Aset Lainnya	17.425.093.324	8.035.763.875	9.389.329.449	116,84
<b>Jumlah Aset</b>	<b>510.705.154.959</b>	<b>252.690.261.376</b>	<b>258.014.893.583</b>	<b>102,11</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	845.274.066	150.002.814	695.271.252	463,51
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>845.274.066</b>	<b>150.002.814</b>	<b>695.271.252</b>	<b>463,51</b>
<b>Ekuitas</b>				
Ekuitas	509.859.880.893	252.540.258.562	257.319.622.331	101,89
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>509.859.880.893</b>	<b>252.540.258.562</b>	<b>257.319.622.331</b>	<b>101,89</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>510.705.154.959</b>	<b>252.690.261.376</b>	<b>258.014.893.583</b>	<b>102,11</b>

## 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.673.413, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp191.316.335.654, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp191.262.662.241). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp506.100.339 sehingga Defisit-LO terjadi sebesar (Rp190.756.561.902). Defisit-LO akan mengurangi nilai Ekuitas pada tahun berjalan.

Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Laporan Operasional**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Kegiatan Operasional</b>				
Pendapatan Operasional	53.673.413	47.415.535	6.258.778	13,20
Beban Operasional	191.316.335.854	161.172.298.219	30.144.037.436	18,70
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(191.262.662.241)	(161.124.881.584)	(30.137.780.657)	18,70
<b>Kegiatan Non Operasional</b>				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	506.100.339	257.215.696	248.884.643	96,76
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(190.756.561.902)	(160.867.665.888)	(29.888.896.014)	18,58
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Surplus/Defisit LO	(190.756.561.902)	(160.867.665.888)	(29.888.896.014)	18,58

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 acalah sebesar Rp252.540.258.562 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp190.756.561.902). Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp234.878.663.778, dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp213.197.520.455, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp509.859.880.893.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
<b>Ekuitas Awal</b>	252.540.258.562	256.917.068.226	(4.376.809.664)	(1,70)
Surplus/Defisit LO	(190.756.561.902)	(160.867.665.888)	(29.888.896.014)	18,58
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	234.878.663.778	1.873.748.813	232.804.914.865	11.800,13
Transaksi Antar Entitas	213.197.520.455	154.517.107.311	59.680.413.144	37,98
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	257.319.622.331	(4.376.809.664)	261.696.431.995	(5.979,16)
<b>Ekuitas Akhir</b>	509.859.880.893	252.540.258.562	257.319.622.331	101,89

#### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, antara lain pengungkapan kegiatan yang dibiayai dari hibah dan hasil penilaian kembali Aset Tetap PPATK.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca per 31 Desember 2019, nilai Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau selara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh PPATK untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## Laporan Realisasi Anggaran

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		%	31 DESEMBER 2018 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	673.487.600	-	348.338.868
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	673.487.600	-	348.338.868
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.1	82.330.564.000	81.764.770.304	99.31	69.628.280.061
Belanja Barang	B.2.1.2	73.531.934.000	66.609.985.628	89.31	54.644.073.748
Belanja Modal	B.2.1.3	55.605.228.000	48.250.413.527	86.77	13.616.302.759
<b>JUMLAH BELANJA</b>		211.467.728.000	196.685.189.469	92.54	137.888.656.568

Jakarta, 4 Mei 2020

Wakil Kepala, ✓



Dian Ediana Rae

## Neraca

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

NAMA PERKIRIAN	GATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	C.1		
Kas di Berudahara Pengeluaran	C.1.1	16.777.287	1.394.382
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Belanja Dibayarkan Dimuka (propivid)	C.1.3	2.195.433.272	1.783.726.900
Persediaan	C.1.4	2.059.587.846	1.772.854.264
Jumlah Aset Lancar		4.271.598.205	3.557.957.546
<b>Aset Tetap</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	233.761.358.040	81.705.022.040
Peralatan dan Mesin	C.2.2	146.478.871.735	118.793.778.109
Gedung dan Bangunan	C.2.3	224.201.982.974	147.070.688.731
Jalan, Irigasi dan Janjangan	C.2.4	235.502.000	628.288.198
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	382.508.987	308.151.787
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(116.051.858.306)	(107.407.386.910)
Jumlah Aset Tetap		489.008.463.430	241.095.538.955
<b>Aset Lainnya</b>	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	37.044.447.353	23.821.657.736
Aset Lain-lain	C.3.2	4.336.379.891	3.107.133.503
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(23.955.733.920)	(18.832.227.366)
Jumlah Aset Lainnya		17.426.093.324	8.035.763.875
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>510.706.164.959</b>	<b>252.690.261.376</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	810.628.355	144.780.102
Utang Yang Belum Dilagihkan	C.4.2	-	-
Pendapatan Diterima Dirukuh	C.4.3	17.868.416	3.828.330
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	16.777.287	1.394.382
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>845.274.066</b>	<b>150.002.814</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>845.274.066</b>	<b>150.002.814</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas</b>	C.5	508.859.880.893	252.540.258.562
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>508.859.880.893</b>	<b>252.540.258.562</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>510.706.164.959</b>	<b>252.690.261.376</b>

Jakarta, 4 Mei 2020

Wakil Kepala,

Dian Edlana Rae

## Laporan Operasional

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Operasional**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	53.673.413	47.416.636
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>53.673.413</b>	<b>47.416.636</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	82.237.823.707	68.830.709.656
Beban Persediaan	D.3	3.730.618.452	3.320.951.611
Beban Barang dan Jasa	D.4	45.973.335.150	39.891.857.636
Beban Pemeliharaan	D.5	5.866.885.990	8.153.426.987
Beban Perjalanan Dinas	D.6	28.031.068.326	21.491.685.424
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	25.454.613.029	21.483.608.932
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>191.316.335.654</b>	<b>161.172.298.219</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(191.262.562.241)</b>	<b>(161.124.381.584)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	70.922.222	114.568.876
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	2.310.000	1.394.125
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		<b>68.912.222</b>	<b>113.175.880</b>
<b>SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	816.113.990	198.228.039
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	179.825.873	54.188.193
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		<b>437.188.117</b>	<b>144.039.846</b>
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>506.100.339</b>	<b>257.216.696</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(190.756.961.902)</b>	<b>(160.867.666.888)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	D.12	<b>(190.756.961.902)</b>	<b>(160.867.666.888)</b>

Jakarta, 4 Mei 2020

Wakil Kepala



Dian Ediana Rae

## Laporan perubahan Ekuitas

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**  
**Per 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	252.540.258.562	256.917.068.226
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(190.756.561.902)	(160.867.065.888)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	234.878.553.778	1.973.748.913
Koreksi atas Reklasifikasi		(406.788.943)	-
Selisih Revaluasi Aset		238.409.409.524	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(3.203.978.603)	1.890.447.550
Lain-lain		-	93.301.363
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	213.197.520.455	154.517.107.311
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		257.319.622.331	(4.376.809.664)
EKUITAS AKHIR	E.5	509.859.880.893	252.540.258.562

Jakarta, 4 Mei 2020  
Wakil Kepala,



Dian Ediana Rae

## Catatan atas Laporan Keuangan

## Catatan atas Laporan Keuangan

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

##### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyiaihan Piutang Tidak Teragih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

✓ G.

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK dituangkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2015 s.d. 2019 sebagai berikut:

### 1. Visi PPATK

Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

### 2. Misi PPATK

- Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
- Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia
- Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK.

### 3. Tujuan

- Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

### 4. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

PPATK berupaya untuk mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan di Indonesia dengan menjadi *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, sehingga arah kebijakan dan strategi yang ditempuh PPATK pada periode 2015 s.d. 2019, sebagai berikut:



#### • Arah Kebijakan dan Strategi PPATK (lanjutan)

- a. Arah Kebijakan PPATK tahun 2015 s.d. 2019
  - 1) Perluasan dan peningkatan peran Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan.
  - 2) Perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.
  - 3) Peningkatan kualitas Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), Informasi, dan Hasil Riset Tipologi TPPU.
  - 4) Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut HA, HP dan Informasi kepada penyidik TPPU dan instansi terkait lainnya.
  - 5) Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif.
  - 6) Peningkatan kemampuan Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU.
  - 7) Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
- b. Strategi yang akan dilaksanakan PPATK tahun 2015 s.d. 2019
  - 1) Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor secara lebih efektif dan menyeluruh.
  - 2) Meningkatkan keandalan sistem pelaporan untuk mendukung Pihak Pelapor dalam penuhan kewajiban pelaporan.
  - 3) Meningkatkan pembinaan terhadap Pihak Pelapor yang lebih efektif dan berkesinambungan.
  - 4) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengaksesan data yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.
  - 5) Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait.
  - 6) Meningkatkan kerja sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain dalam rangka pertukaran informasi.
  - 7) Meningkatkan kapasitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis.
  - 8) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.
  - 9) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi TPPU.
  - 10) Pelaksanaan *National Risk Assessment* (NRA).
  - 11) Mendorong penyidik TPPU untuk mengoptimalkan penggunaan sistem *Secure Online Communication* (SOC) dalam proses pertukaran informasi.

4 67

- 12) Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong penyidik TPPU untuk menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada PPATK terkait penanganan tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi.
- 13) Meningkatkan upaya penyusunan produk hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.
- 14) Implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur,
- 15) Pelaksanaan pelatihan bagi Pihak Pelapor dan penyidik TPPU secara lebih efektif dan menyeluruh.
- 16) Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia PPATK.
- 17) Meningkatkan keandalan sistem TI PPATK.
- 18) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja PPATK.
- 19) Meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif.
- 20) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPATK.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan Keuangan

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah, yang hanya memiliki satu Bagian Anggaran (BA) yaitu BA 078, dan dua Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima. Satuan Kerja di PPATK terdiri dari Satuan Kerja Kantor Pusat PPATK (Satker 453374) dan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Satker 417654).

Berdasarkan Surat Kepala PPATK Nomor T/232/KU.02/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 hal Permohonan Mengikuti Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan persetujuan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 905/KMK.05/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, PPATK mengimplementasikan aplikasi SAKTI dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sejak 1 Januari 2019.

Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan.

Pada aplikasi SAKTI, Modul Akuntansi dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan Laporan Keuangan, Modul Aset Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan.

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Perubahan mendasar pada Aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat Open-Closing Period untuk melakukan buka-tutup periode buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Sebelum melakukan tutup buku, operator Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan validasi seluruh transaksi dan memposting jurnal yang timbul dari modul terkait lainnya (Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, Modul Komitmen, dan Modul Bendahara).

Pada closing period Modul Akuntansi dan Pelaporan, secara otomatis modul lainnya tutup buku pada periode yang sama. Periode Akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode audited.

Basis Akuntansi:

### A.4. Basis Akuntansi

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kedua basis akuntansi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran:

### A.5. DASAR PENGUKURAN

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi:

### A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

#### A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

##### 1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Pendapatan-LRA di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan-LO

##### 2. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu:
  - Pendapatan Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui secara proporsional oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
  - Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, yaitu pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban-beban yang ada).
- Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

↳ C.

- 2. Pendapatan-LO (lanjutan)**
- e. Pendapatan-LO di PPATK berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  - f. Pendapatan PNBP-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN.
    - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan.
- Belanja**
- 3. Belanja**
- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dan KUN.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  - c. Belanja dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban**
- 4. Beban**
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - c. Beban dijelaskan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset**
- 5. Aset**
- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh PPATK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
  - c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- Aset Lancar**
- 1) Aset Lancar**
- a) Aset Lancar diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**1) Aset Lancar (lanjutan)**

- b) Aset Lancar terdiri dari kas atau setara kas, piutang dan persediaan.
- c) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan di neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- d) Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.
- e) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perpendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- f) Piutang dijelaskan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- g) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- h) Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, Kementerian Keuangan menetapkan bahwa seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Selisih harga pembelian barang yang terjadi akan dilakukan koreksi nilai persediaan.
- i) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

 L,

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

**2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b) Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- c) Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan pada Tabel 6.

Tabel 6  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Penitip Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Aset Tetap

**3) Aset Tetap**

- a) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- c) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

✓ 6.

**3) Aset Tetap (lanjutan)**

- d) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan perlimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- e) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- f) Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Nomor S-363/PB/2020 tanggal 24 April 2020 hal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) TA 2019 (Audited), telah dilaksanakan rekonsiliasi tripartit koreksi revaluasi Barang Milik Negara (BMN) antara PPATK, BPK dan Kementerian Keuangan dan disepakati Nota Kesepakatan Angka Asersi Final (NKF) Revaluasi BMN Nomor NKF Revaluasi-078/32/KN.2/2020 tanggal 28 April 2020, sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.
- g) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

46

**3) Aset Tetap (lanjutan)**

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- h) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BNN.

Penyusutan Aset Tetap

**4) Penyusutan Aset Tetap**

- a) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap juga diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.06/2017.
- b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah
  - 2) Konstruksi Dalam Pengrajaan (KDP)
  - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara morata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- f) Secara umum tabel masa manfaat dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7  
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang****5) Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Temasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**Aset Lainnya****6) Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Temasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Tak Berwujud pada PPATK berupa software dan memiliki masa manfaat terbatas hingga 4 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

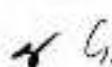
46

Kewajiban	<p><b>6. Kewajiban</b></p> <p>a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.</p> <p>b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.</p> <p>1) Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.</p> <p>2) Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</p> <p>c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.</p>
Ekuitas	<p><b>7. Ekuitas</b></p> <p>Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor SP-DIPA-078.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu awal PPATK Tahun 2019 sebesar Rp180.362.223.000 dan mengalami beberapa kali revisi, sehingga pagu akhir PPATK menjadi Rp211.467.726.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Satker 453374 Nomor SP-DIPA-078.01.1.453374/2019 pada 1 Januari 2019 sebesar Rp158.316.563.000, dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah mengalami 5 (lima) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp186.833.168.000.
2. DIPA Satker 417654 Nomor SP-DIPA-078.01.1.417654/2019 pada 1 Januari 2019 sebesar Rp22.045.660.000, dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah mengalami 5 (lima) kali revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp24.634.558.000.

 G,

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (lanjutan)**

Perubahan DIPA PPATK Tahun 2019 dijelaskan pada Tabel 8.

**Tabel 8**  
Perubahan DIPA PPATK Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Awal	Estimasi Pendapatan/ Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-
<b>Belanja</b>			
1	Belanja Pegawai	51.046.947.000	82.330.564.000
2	Belanja Barang	69.674.285.000	73.531.934.000
3	Belanja Modal	49.640.991.000	55.605.228.000
	Jumlah Belanja	180.362.223.000	211.467.726.000

Perubahan DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2019 dijelaskan pada Tabel 9.

**Tabel 9**  
Perubahan DIPA PPATK Berdasarkan Program Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

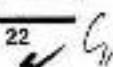
No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teks Lainnya PPATK	85.590.159.000	112.907.001.000
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	94.372.064.000	98.560.725.000
	Jumlah Belanja	180.362.223.000	211.467.726.000

Realisasi Pendapatan  
Rp673.487.690**B.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp673.487.690 dan Rp348.338.868. Keseluruhan Pendapatan PPATK adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dijelaskan pada Tabel 10.

**Tabel 10**  
Rincian Realisasi Pendapatan  
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019		
		Estimasi	Realisasi	%
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	673.487.690	-
	a. Pendapatan dari Pemindahtempatan BMN Lainnya	-	70.922.222	-
	b. Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya		25.226.000	-
	c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	42.487.499	-



No.	Uraian	31 Desember 2019		
		Estimasi	Realisasi	%
d.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	11.100.249	-
e.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	50.726.593	-
f.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	173.025.127	-
	Jumlah	-	673.487.690	-

PNBP PPATK Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp673.487.690 terdiri dari:

- a. Pendapatan dari Pemindahtempat BMN Lainnya sebesar Rp70.922.222, terdiri dari:
  - 1) Pelepasan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp32.122.222 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 227/28/2019 tanggal 19 Juli 2019, Bukti Penerimaan Negara Nomor NTPN CE2D67QLTANHAUCF tanggal 26 Juli 2019, dan BAST Nomor BAST-01/PL.05.01/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
  - 2) Pelepasan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp38.800.000 sesuai dengan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-4187/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 3 September 2019, dan BAST Nomor BAST-02/PL.05.01/VIII/2019 tanggal 24 September 2019.
- b. Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya sebesar Rp25.226.000 adalah pendapatan sewa lahan untuk ATM dengan nomor NTPN 6387A48VU0GKKJ1S dan nomor kontrak PERJ-01/PL.03.03/PPATK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa sewa 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021.
- c. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp42.487.499, antara lain:
  - 1) Pencairan jaminan pelaksanaan (bank garansi) PT NKN untuk penyediaan pengadaan konsumsi diklat sebesar Rp22.875.000 di Satker 417654.
  - 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan jasa internet sebesar Rp18.391.468.
- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp11.100.249 merupakan pengembalian belanja atas kelebihan Tunjangan Umum sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018.
- e. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp50.726.593 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018.
- f. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp173.025.127 dari pihak ketiga sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 dan 2018.

**B.1. Pendapatan (lanjutan)**

Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 93,34% dibandingkan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh pengembalian Belanja Pegawai dan Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang sebagian besar merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2018.

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 11.

**Tabel 11**  
**Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

No.	Urutan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)
		Rp	%	
1.	Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	673.487.690	348.338.868	325.148.822 93,34
a.	Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN Lainnya	70.822.222	114.569.976	(43.647.754) (38,10)
b.	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya	25.226.000	-	25.226.000 -
c.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	42.487.499	38.228.638	4.258.861 11,14
d.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.100.249	5.537.066	5.563.184 100,47
e.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	50.728.593	96.701.826	(45.975.233) (47,54)
f.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	473.025.127	93.301.363	379.723.764 408,99
	Jumlah	673.487.690	348.338.868	325.148.822 93,34

Kenaikan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya atas perpanjangan kontrak sewa lahan ATM dengan masa sewa 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021.
- Terdapat kenaikan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah karena penyedia barang/jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
- Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL karena pengembalian belanja atas kelebihan Tunjangan Umum sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018.
- Terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebagai tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2016 dan 2018.

Realisasi Belanja (Neto)  
Rp 196.685.169.459

## B.2. Belanja

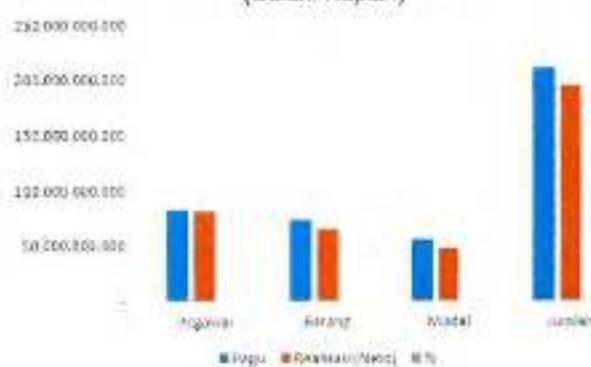
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 menurut jenis belanja dijelaskan pada Tabel 12

Tabel 12  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)  
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	%
Pegawai	82.330.564.000	81.764.770.304	99,31
Barang	73.531.934.000	65.669.985.628	89,31
Modal	55.605.228.000	48.250.413.527	85,77
Jumlah	211.467.726.000	196.685.169.459	92,54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)  
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)



Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 92,54% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2018, yang disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 13.

Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2019 (Neto)	31 Desember 2018 (Neto)	Rp	%
Pegawai	81.764.770.304	69.628.280.051	12.136.480.243	17,43
Barang	65.669.985.628	54.644.073.748	11.025.911.880	20,18
Modal	48.250.413.527	33.616.302.759	14.634.110.768	254,36
Jumlah	196.685.169.459	137.888.666.568	58.796.612.891	41,92

Realisasi Belanja Pegawai (Neto)  
Rp81.784.770.304

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (Neto) masing-masing sebesar Rp81.784.770.304 dan Rp69.628.280.061. Realisasi Belanja Pegawai di PPATK pada Tahun 2019 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai di Satker 453374 dan Satker 417654.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Tahun 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 14.

Tabel 14  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan (Penurunan)
		Rp	%	
<b>Belanja Bruto</b>				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12.596.567.580	9.461.817.740	3.134.679.840
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	201.874	149.057	52.817
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	693.298.588	546.728.888	146.567.672
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	187.770.001	146.035.240	42.742.731
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.004.060.000	962.980.000	51.700.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	140.780.000	79.000.000	61.710.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	49.188.588	32.528.895	16.672.903
511126	Belanja Tunjangan Dinas PNS	589.281.543	474.051.320	115.220.223
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.969.642.000	1.693.545.750	275.996.250
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	700.185.000	538.510.000	161.685.000
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	2.290.700.400	2.558.248.000	(267.547.600)
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	531.760.120	618.658.210	(87.088.090)
512111	Belanja Uang Honor Tetap	11.039.963.848	8.778.846.833	2.261.128.112
512211	Belanja Uang Lembur	220.013.003	348.785.000	(128.772.000)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	49.781.581.955	43.430.896.258	6.350.685.697
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>81.795.641.581</b>	<b>69.660.237.999</b>	<b>12.136.403.582</b>
<b>Pengembalian Debit Pegawai</b>		<b>30.871.277</b>	<b>31.957.929</b>	<b>(1.086.651)</b>
<b>Total Belanja Pegawai</b>		<b>81.764.770.304</b>	<b>69.628.280.061</b>	<b>12.136.490.243</b>
				<b>17,43</b>

Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 17,43% dibanding Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat kenaikan Belanja Gaji Pokok PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, alih status pegawai diperkerjakan menjadi pegawai tetap, penambahan pegawai diperkerjakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ke-13 (Tiga Belas).
- b. Terdapat kenaikan Belanja Pembulatan Gaji PNS karena penerimaan CPNS yang mengakibatkan meningkatnya pembulatan Gaji.
- c. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS antara lain karena penambahan CPNS dan perubahan status pernikahan PNS.
- d. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Anak PNS, antara lain karena penerimaan CPNS dan penambahan tanggungan PNS.
- e. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Struktural PNS, antara lain karena pengangkatan pejabat struktural baru.

#### B.2.1 Belanja Pegawai (lanjutan)

- f. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS karena penambahan jumlah pegawai yang menerima tunjangan fungsional untuk Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Auditor.
- g. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan PPh PNS, karena bertambahnya jumlah pegawai yang mengakibatkan meningkatnya tunjangan PPh.
- h. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Beras PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, penambahan pegawai dipekerjakan dan tambahan tanggungan PNS.
- i. Terdapat kenaikan Belanja Tunjangan Umum PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, alih status pegawai dipekerjakan menjadi pegawai tetap, penambahan pegawai dipekerjakan, pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 (Tiga Belas).
- j. Terdapat kenaikan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) karena penerimaan CPNS, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Khusus Ke-13 (Tiga Belas).

Namun, terdapat beberapa pos Belanja Pegawai yang mengalami penurunan, yaitu:

- a. Penurunan Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara karena pada tahun 2018 terdapat pembayaran penghasilan dan fasilitas pimpinan susulan.
- b. Penurunan Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara karena pada tahun 2018 terdapat pembayaran penghasilan dan fasilitas pimpinan susulan.
- c. Penurunan Belanja Uang Lembur karena penyelesaian pekerjaan dilakukan dengan Rapat Dalam Kantor.

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp30.871.277, terdiri dari:

- a. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp130.670.
- b. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp26.408.
- c. Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS sebesar Rp163.464.
- d. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp386.000.
- e. Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap sebesar Rp22.435.735 atas kelebihan pembayaran THR PPNPN PPATK tahun 2019 di Satker 453374 dan Satker 417654.
- f. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) sebesar Rp7.750.000.

Realisasi Belanja Barang (neto)  
Rp65.669.985.628

#### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp65.669.985.628 dan Rp54.644.073.748.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 15.

✓ 6

**B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)**

**Tabel 15**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama-Akun	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
<b>Belanja Barang</b>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	854.494.640	708.762.810	145.732.030	20,58
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	298.853.301	125.271.959	83.381.542	69,58
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.418.344	180.889.088	24.525.456	13,56
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31.150.000		31.150.000	-
521118	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.131.645.038	882.903.788	538.742.270	65,71
521211	Belanja Bahan	3.329.853.082	3.813.047.716	(283.194.634)	(7,34)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	395.400.000	381.800.000	17.600.000	4,61
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.703.224.837	8.056.774.301	5.646.450.536	63,23
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.991.232.607	3.943.915.898	42.317.012	1,07
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Veteran dan Leges	10.042.003	5.798.300	5.246.000	87,06
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	219.158.457	179.500.579	39.657.878	22,10
522111	Belanja Langgaran Listrik	3.578.832.159	3.165.181.361	414.650.798	13,10
522112	Belanja Langgaran Telepon	106.508.048	83.682.787	22.305.259	27,40
522113	Belanja Langgaran Air	9.221.585	12.178.290	(2.956.695)	(34,28)
522119	Belanja Langgaran Daya dan Jasa Lainnya	1.060.380.200	805.628.566	254.751.644	31,62
522131	Belanja Jasa Konsultasi	907.249.000	3.726.184.000	(2.728.935.000)	(73,24)
522141	Belanja Sewa	906.492.370	923.555.550	(18.064.180)	(1,66)
522151	Belanja Jasa Profesi	1.458.100.000	1.312.150.000	145.950.000	11,12
522191	Belanja Jasa Lainnya	1.908.432.700	1.274.466.000	633.966.700	49,74
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.960.268.353	2.367.325.208	(407.056.855)	(17,19)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71.524.405	109.880.560	(38.356.155)	(34,86)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.440.210.448	1.431.550.018	18.660.432	1,18
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000	113.597.098	(73.597.098)	(54,81)
523175	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.068.014.051	2.068.235.185	(18.191.134)	(0,88)
524111	Belanja Perjalanan Dinas	13.051.174.946	10.947.571.815	2.103.603.031	19,21
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	808.828.003	478.550.000	129.278.003	27,15
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.803.289.800	2.082.261.800	2.543.988.000	123,38
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.895.111.897	3.484.495.703	411.612.194	11,91
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6.045.093.645	4.777.649.047	1.257.444.598	26,53
<b>Jumlah Belanja Barang Bruto</b>		<b>55.857.693.432</b>	<b>54.908.070.789</b>	<b>10.949.622.643</b>	<b>19,94</b>
<b>Pengembalian Bantuan</b>		<b>187.707.864</b>	<b>263.967.041</b>	<b>(76.289.237)</b>	<b>(28,90)</b>
<b>Total Belanja Barang</b>		<b>55.669.885.528</b>	<b>54.644.073.748</b>	<b>11.025.911.880</b>	<b>20,18</b>

Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 20,18%. Kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Kenaikan Belanja Keperluan Perkantoran karena terdapat peningkatan keperluan sehari-hari perkantoran di Satker 453374 dan Satker 417654, antara lain:
  - Pengadaan paket peralatan dan fasilitas perkantoran di Satker 453374.
  - Pengadaan perlengkapan rumah tangga di Satker 417654.
- Kenaikan Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh, karena terdapat penambahan pegawai baru.
- Kenaikan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos karena peningkatan frekuensi kegiatan dan koordinasi dengan menggunakan jasa pengiriman surat dinas ke luar kota.

**B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)**

- d. Kenaikan Belanja Honor Operasional Satuan Kerja karena terdapat pembebasan pembayaran honor bendahara pengeluaran di Satker 453374 dan Satker 417654.
- e. Kenaikan Belanja Barang Operasional Lainnya, antara lain:
  - 1) Terdapat pembayaran bantuan operasional untuk tenaga pengamanan, pengemudi, protokol, ajudan, tenaga caraka, tenaga pengurus visa/paspor dinas, dan petugas penghubung pengurusan dokumen anggaran dan keuangan di Satker 453374 dan 417654.
  - 2) Terdapat pengadaan pakaian dinas tenaga penunjang di Satker 453374 sesuai dengan BAST No. BAST-10.102/PL.02/X/19 tanggal 7 Oktober 2019.
  - 3) Terdapat pengadaan pakaian dinas tenaga penunjang di Satker 417654 sesuai dengan BAST Nomor: BAST-044.09/PL.02/IX/2019 tanggal 2 September 2019.
- f. Kenaikan Belanja Honor Output Kegiatan, antara lain:
  - 1) Terdapat pembayaran honorarium Tim Pelaksana Eksternal Pemutakhiran National Risk Assessment (NRA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dari TPPT di Satker 453374 sesuai Surat Keputusan Kepala PPATK nomor 105 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019.
  - 2) Terdapat pembayaran honorarium Komite dan Tim Pelaksana Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Satker 453374 sesuai Surat Keputusan Kepala PPATK No. 19K Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019.
- g. Kenaikan Belanja Non Operasional Lainnya, antara lain:
  - 1) Terdapat pembayaran di Satker 453374 atas iuran keanggotaan Indonesia di FATF sesuai Pre Acceptance Invoice Nomor DAF/D03386/80000279 tanggal 31 Mei 2019.
  - 2) Terdapat pembayaran untuk perpanjangan lisensi aplikasi di Satker 453374.
  - 3) Terdapat pengadaan Training Fasilitator di Satker 417654 sesuai dengan BAST-104.12/PL.02/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
  - 4) Terdapat pembayaran di Satker 453374 atas pengadaan pelatihan dasar dan MFD Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta kegiatan capacity building lainnya untuk pegawai PPATK.
  - 5) Terdapat pengadaan tes kesehatan bagi pegawai di Satker 453374 sesuai dengan BAST No. BAST-11.151/PL.02/XI/2019 tanggal 14 November 2019.
- h. Kenaikan Belanja Barang Persediaan Lainnya karena pengadaan barang persediaan obat-obatan dan bahan gigi di klinik umum dan klinik gigi Satker 453374.
- i. Kenaikan Belanja Langganan Listrik, antara lain karena peningkatan penggunaan listrik dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor dan kegiatan diklat di Satker 417654.

**B.2.2 Belanja Barang (lanjutan)**

- j. Kenaikan Belanja Jasa Profesi karena peningkatan kegiatan sosialisasi yang menggunakan jasa narasumber di Satker 417654 dan Satker 453374.
- k. Kenaikan Belanja Jasa Lainnya antara lain karena pengadaan jasa Professional Conference Organiser dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Egmont Group Meeting.
- l. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas Biasa karena peningkatan frekuensi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK.
- m. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota karena peningkatan frekuensi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor, dan koordinasi dengan eksternal lainnya.
- n. Kenaikan Belanja Paket Meeting Dalam Kota antara lain karena PPATK menjadi tuan rumah kegiatan Egmont Group Meeting yang dilaksanakan pada 29 – 31 Januari 2019 dan terdapat kegiatan rapat koordinasi internal dan eksternal.
- o. Kenaikan Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri antara lain disebabkan:
  - 1) Menghadiri pertemuan/undangan Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka persiapan Indonesia untuk menjadi anggota FATF.
  - 2) Menghadiri pertemuan/undangan Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) dan Egmont Group antara lain dalam rangka membahas hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta meningkatkan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan di dunia.

Penurunan realisasi Belanja Barang, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penurunan Belanja Bahan karena berkurangnya frekuensi rapat koordinasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK.
- b. Penurunan Belanja Jasa Konsultan karena tidak ada kegiatan Survei Persepsi Publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT pada tahun 2019.
- c. Penurunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan karena terdapat kegiatan re-layout Gedung Kantor Pusat PPATK.

46

Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang senilai Rp187.707.804, terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp210.000.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp9.780.000.
- Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.499.839.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp145.089.565.
- Pengembalian Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp3.000.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp14.550.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp13.578.400.

Realisasi Belanja Modal  
(Neto)  
Rp48.250.413.527

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp48.250.413.527 dan Rp13.616.302.759. Terjadi kenaikan Realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 254,36%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 16

Tabel 16  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
<b>Belanja Bruto</b>					
531111	Belanja Modal Tanah	1.650.522.400	-	1.650.522.400	-
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.362.492.507	10.388.268.455	17.978.226.062	173,06
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	452.540.000	1.237.200.000	(784.660.000)	(63,42)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	64.302.500	13.430.000	50.872.500	379,80
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3.018.065.485	547.075.980	2.470.989.505	451,87
533111	Belanja Modal Lainnya	14.702.490.635	1.432.330.324	13.270.160.311	926,47
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>48.250.413.527</b>	<b>13.616.302.759</b>	<b>34.634.110.768</b>	<b>254,36</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>					
<b>Total Belanja Modal</b>		<b>48.250.413.527</b>	<b>13.616.302.759</b>	<b>34.634.110.768</b>	<b>254,36</b>

Kenaikan yang signifikan terjadi pada Belanja Modal sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah karena pembayaran belanja modal atas biaya pengadaan 3 (tiga) bidang tanah di lingkungan Satker 417654 dengan rincian sebagai berikut:
  - Pengadaan 3 (tiga) bidang tanah dengan nilai total Rp1.629.700.000.
  - Pembayaran Notaris PPAT atas Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan nilai total Rp20.822.400.

### B.2.3 Belanja Modal (lanjutan)

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, antara lain:
  - 1) Terdapat pengadaan kendaraan dinas Eselon I dan Eselon II di Satker 453374.
  - 2) Terdapat pengadaan komputer dan peralatan komputer di Satker 453374.
  - 3) Terdapat pengadaan Meubelair di Satker 453374.
  - 4) Terdapat pengadaan peralatan elektronik di Satker 417654.
- c. Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan, antara lain karena terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas dan biaya representatif terkait pengadaan tanah beserta gedung bangunan di Satker 417654.
- d. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, antara lain:
  - 1) Terdapat pembayaran belanja modal atas perbaikan 2 (dua) unit rumah di lingkungan Satker 417654.
  - 2) Terdapat pembayaran belanja modal atas biaya pengadaan pengaspalan di Satker 417654.
  - 3) Terdapat pembayaran belanja modal atas pengadaan jasa konsultan perencanaan, jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultan pengawas dalam rangka re-layout gedung kantor Satker 453374.
- e. Belanja Modal Lainnya, antara lain karena pengadaan aplikasi pelaporan dan analisis transaksi keuangan serta aplikasi Politically Exposed Persons (PEP) di Satker 453374.

Namun, terdapat penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena pada Tahun ANGGARAN 2019 terdapat pemisahan alokasi belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas pengadaan 3 (tiga) bidang tanah termasuk gedung yang melekat di tanah tersebut di lingkungan Satker 417654.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

Aset Lancar  
Rp4.271.598.205

#### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.271.598.205 dan Rp3.557.957.546.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar PPATK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20.06% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Rincian Aset Lancar PPATK per 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 17.

✓ G,

**C.1. Aset Lancar (lanjutan)**

Tabel 17  
Rincian Aset Lancar  
Per 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan) Rp.	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.777.287	1.394.382	15.382.905	1.103,21
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2.195.433.272	1.783.708.900	411.724.372	23,08
4	Persediaan	2.059.387.646	1.772.854.264	286.533.382	16,16
	Jumlah	4.271.598.205	3.557.957.546	713.640.659	20,06

Kas di Bendahara Pengeluaran  
Rp16.777.287

**C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.777.287 dan Rp1.394.382 karena Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran sisa kas melewati batas akhir penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2019.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.777.287 terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran Satker 4533/4 sebesar Rp0.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran Satker 417654 sebesar Rp16.777.287.

Kas Lainnya dan Setara Kas  
Rp0

**C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP/LS BP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang belum disetorkan ke Kas negara.

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018.

Belanja Dibayar Dimuka  
(prepaid)  
Rp2.195.433.272

**C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.195.433.272 dan Rp1.783.708.900. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per tanggal 31 Desember 2019 merupakan biaya perpanjangan lisensi software yang sudah dibayar secara penuh di tahun 2019, namun jangka waktu lisensinya melewati 31 Desember 2019.

46

**C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) (lanjutan)**

Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Licensi Software pada PPATK per 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 18.

Tabel 18  
Rincian Belanja Dibayar di Muka atas Perpanjangan Licensi Software  
Per 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian Perpanjangan Licensi	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp.	%
1	AD 360 Manage Engine	12.156.268	9.614.151	2.542.115	26,44
2	Application Manager	8.558.208	-	8.558.208	-
3	Asset Explorer	7.775.236	-	7.775.236	-
4	Cisco	58.098.082	-	58.098.082	-
5	Core Switch	58.634.521	55.237.830	3.395.691	6,15
6	DNS Umbrella	48.112.077	42.910.057	5.202.020	12,12
7	ESTIM	33.331.507	-	33.331.507	-
8	Firewall	330.744.364	344.849.621	(13.905.237)	(4,03)
9	FortiAnalyzer	20.736.594	-	20.736.594	-
10	FortiProxy	13.020.652	-	13.020.652	-
11	McAfee	429.000.000	350.892.872	58.007.128	18,84
12	Mdsamon	50.970.082	19.513.698	31.456.363	161,20
13	Microsoft Office 365	162.411.820	131.044.713	31.367.107	23,84
14	NAS	290.207.650	-	290.207.650	-
15	Network Forensic	-	84.482.958	(84.482.958)	(100,00)
16	Oracle	324.236.897	315.376.572	8.860.325	2,81
17	Site Recovery Manager	8.843.890	-	8.843.890	-
18	Support Server	78.983.014	-	78.983.014	-
19	Support Storage Area Network	-	229.217.033	(229.217.033)	(100,00)
20	Vcenter	26.780.769	-	26.780.769	-
21	Verisign SSL Certificates	48.116.853	54.064.197	(15.947.244)	(24,89)
22	Veritas NetBackup	18.166.575	13.282.500	4.884.075	36,77
23	Vmware	93.524.324	70.815.385	22.908.939	32,44
24	VPN	14.627.596	-	14.627.596	-
25	WAF Support + RMA	58.396.175	42.707.312	15.688.863	36,74
Jumlah Perpanjangan Licensi 2019		2.195.433.272	1.783.708.800	411.724.372	23,08

Persediaan  
Rp2.059.387.646

**C.1.4. Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.059.387.646 dan Rp1.772.854.264.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, untuk dijual, atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 16,16% jika dibandingkan dengan nilai Persediaan per 31 Desember 2018 karena terdapat peningkatan persediaan barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang dan persediaan lainnya.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 19.

46,

**C.1.4. Persediaan (lanjutan)**

Tabel 19  
Rincian Persediaan  
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Konsumsi	1.689.478.823	1.452.081.149	237.417.574	16,35
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	169.155.503	133.044.468	36.111.015	27,14
3	Bahan Baku	18.587.800	21.987.735	(3.408.935)	(15,90)
4	Suku Cadang	113.547.501	100.510.155	13.037.346	12,97
5	Pita Cukai Materai dan Leges	750.000	-	750.000	-
6	Persediaan Lainnya	67.588.019	65.240.737	2.627.282	4,03
Jumlah		2.089.387.846	1.772.854.264	316.533.382	16,16

Seluruh persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik.

Aset Tetap  
Rp489.008.463.430

**C.2 Aset Tetap**

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp489.008.463.430 dan Rp241.096.539.955 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 102,83% jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 karena terdapat peningkatan nilai Akumulasi Penyusutan. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 20.

Tabel 20  
Rincian Aset Tetap  
Per 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	233.761.358.040	81.705.022.040	152.056.336.000	185,06
2	Peralatan dan Mesin	146.470.871.735	118.793.778.109	27.685.093.626	23,31
3	Gedung dan Bangunan	224.201.932.974	147.970.688.731	76.231.243.243	52,45
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	235.602.000	528.285.108	(392.684.198)	(52,60)
5	Aset Tetap Lainnya	382.506.987	306.151.787	76.355.200	24,98
Jumlah		605.060.321.736	348.503.926.865	256.556.394.871	73,62
Akumulasi Penyusutan		(118.351.858.306)	(107.427.388.910)	10.924.471.396	6,06
Nilai Buku Aset Tetap		489.008.463.430	241.096.639.866	247.911.923.475	102,83

Tanah  
Rp233.761.358.040

**C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp233.761.358.040 dan Rp81.705.022.040.

Aset PPATK berupa tanah, terdiri dari:

1. Tanah seluas 4.500 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp194.364.000.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2007.

**C.2.1 Tanah (lanjutan)**

2. Tanah seluas 5.646 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp8.256.529.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2010.
3. Tanah seluas 9.510 m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Raya Tapos - Cimpaean, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat senilai Rp28.784.107.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaean.
4. Tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaean, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp332.436.600. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
5. Tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaean, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp394.585.440. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
6. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaean, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp528.900.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019.
7. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaean, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp490.200.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
8. Tanah berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaean, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai

✓ 5,

**C.2.1 Tanah (lanjutan)**

Rp610.600.000. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan BAST No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

Mutasi Tanah dapat dijelaskan pada Tabel 21.

Tabel 21  
Mutasi Tanah  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>81.705.022.040</b>
Tanah (Lokasi Jakarta Pusat)	66.600.000.000
Tanah (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	1.281.000.000
Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat)	13.824.022.040
<b>Mutasi tambah tahun 2019:</b>	
Pembelian:	1.650.522.400
Pembelian Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-053A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019 (NJP 4)	528.900.000
Pembelian Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-061A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019 (NJP 5)	490.200.000
Pembelian Tanah (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-062A.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019 (NJP 6)	610.600.000
Pembayaran Belanja Modal Atas Biaya Pengadaan Notans PPAT Atas Perikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan	20.822.400
Revaluasi Aset Tetap:	244.350.697.000
Resume Inventarisasi dan Penilaian No. LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017	244.350.697.000
Resume Inventarisasi dan Penilaian No. LHIP-357/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019	-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>246.001.219.400</b>
<b>Mutasi kurang tahun 2019:</b>	
Resume Inventarisasi dan Penilaian No. LHIP-357/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019	(93.924.061.000)
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(20.822.400)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(93.944.883.400)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>152.056.336.000</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>233.761.358.040</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>233.761.358.040</b>

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Tanah yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam laporan Neraca PPATK per 31 Desember 2019 dan 2018, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### C.2.1 Tanah (lanjutan)

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada face Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap.

Peralatan dan Mesin  
Rp146.478.871.735

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp146.478.871.735 dan Rp118.793.778.109.

Mutasi peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 22.

Tabel 22  
Mutasi Peralatan dan Mesin  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>118.793.778.109</b>
<b>Mutasi tambah tahun 2019:</b>	
Pembelian	28.362.492.507
Perolehan Reklasifikasi Dari Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin	375.020.635
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>28.737.513.142</b>
<b>Mutasi kurang tahun 2019:</b>	
Penghentian Aset Dari Penggunaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(885.677.816)
Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya Alat Kantor dan Rumah Tangga	(166.741.700)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(1.052.419.516)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>27.685.093.628</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>146.478.871.735</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(101.997.535.400)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>44.481.336.335</b>

### C.2.2 Peralatan dan Mesin (lanjutan)

Transaksi mutasi penambahan peralatan dan mesin berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah terealisasi pada tahun 2019 sebesar Rp28.362.492.507, namun terdapat Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi menjadi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp166.741.700. Selain itu penambahan mutasi peralatan dan mesin juga berasal dari perolehan reklasifikasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp375.020.635.

Rincian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal dan reklasifikasi dijelaskan pada Tabel 23

Tabel 23  
Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Peralatan dan Mesin	Penambahan			Pengurangan		
		Belanja Modal	Reklasifikasi	Total	Penghitungan	Ekstrakomptabel	Total
1	Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Alat Angkat	2.120.296.700	-	2.120.296.700	-	-	-
3	Alat Bengkel dan Alat ukur	26.280.100	-	26.280.100	-	-	-
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.031.165.470	375.020.635	3.406.186.105	(385.677.816)	(166.741.700)	(1.052.419.516)
5	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	695.665.550	-	695.665.550	-	-	-
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.720.525	-	31.720.525	-	-	-
7	Alat Laboratorium	29.100.125	-	29.100.125	-	-	-
8	Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
9	Komputer	22.017.837.887	-	22.017.837.887	-	-	-
10	Alat Keselamatan Kerja	178.000.000	-	178.000.000	-	-	-
11	Peralatan Proses/Produksi	45.589.400	-	45.589.400	-	-	-
12	Peralatan Olah Raga	22.235.000	-	22.235.000	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>28.195.750.827</b>	<b>375.020.635</b>	<b>28.570.771.462</b>	<b>(385.677.816)</b>	<b>(166.741.700)</b>	<b>(1.052.419.516)</b>

Gedung dan Bangunan  
Rp224.201.982.974

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp224.201.982.974 dan Rp147.070.658.731.

Gedung dan Bangunan PPATK per 31 Desember 2019, terdiri dari:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung PPATK di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat dengan luas bangunan 16.630 m<sup>2</sup> senilai Rp126.525.721.880.
2. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Arsip PPATK (Ciloto) di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan luas bangunan 2.200 m<sup>2</sup> senilai Rp28.072.324.000.
3. Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dengan luas bangunan 13.183 m<sup>2</sup> senilai Rp68.240.456.114.
4. Bangunan seluas 122 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp258.957.560.

**C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)**

Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.

5. Bangunan seluas 58 m<sup>2</sup> berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaen, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat senilai Rp272.465.400. Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn., dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.
6. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-053B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019 sebesar Rp135.040.000.
7. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-061B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp119.970.000.
8. Bangunan berlokasi di Komplek Pusdiklat APUPPT, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) yang diperoleh berdasarkan BAST No. BAST-062B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp197.530.000.

Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.977.770.616.

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dijelaskan pada Tabel 24.

**Tabel 24**  
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>147.070.688.731</b>
Gedung dan Bangunan (Lokasi Jakarta Pusat)	81.279.315.524
Gedung dan Bangunan (Lokasi Cianjur Jawa Barat)	17.029.021.133
Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat)	68.762.352.074
<i>Mutasi/tambah tahun 2019:</i>	
Pembelian:	452.540.000
Pembelian Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-053B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 9 September 2019)	135.040.000

**C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)**

Pembelian Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-061B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019	119.970.000
Pembelian Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat) berdasarkan BAST No. BAST-062B.09/PL.02/IX/2019 tanggal 30 September 2019	197.530.000
<i>Pengembangan Nilai Aset</i>	317.927.720
Perbaikan Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat)	193.940.120
Pengaspalan jalan di area Gedung dan Bangunan (Lokasi Depok Jawa Barat)	123.987.600
<i>Pengembangan Melalui KDP</i>	2.296.592.780
Revaluasi Aset Tetap	74.078.241.343
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>77.145.301.843</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2019:</i>	
Revaluasi Aset Tetap	(14.007.600)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(14.007.600)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>77.131.294.243</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>224.201.982.974</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(13.977.770.616)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>210.224.212.358</b>

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 77.145.301.843, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp452.540.000 dalam rangka pembelian 3 (tiga) rumah warga di lingkungan Pusdiklat APUPPT.
2. Pengembangan Nilai Aset di Satker 417654 sebesar Rp317.927.720.
3. Pengembangan Melalui KDP di Satker 453374 dan 417654 sebesar Rp2.296.592.780.
4. Koreksi Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp74.078.241.343.

Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp375.020.635, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp14.007.600.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam laporan Keuangan PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup ciungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

46,

**C.2.3 Gedung dan Bangunan (lanjutan)**

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap.

Jalan, Irigasi dan  
Jaringan  
Rp235.602.000

**C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu sebesar Rp235.602.000 dan Rp628.286.198. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp53.999.790 dengan rincian mutasi dijelaskan pada Tabel 25.

Tabel 25  
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>628.286.198</b>
<i>Mutasi tambah tahun 2019:</i>	
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	44.424.000
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>44.424.000</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2019:</i>	
Resume Inventarisasi dan Penilaian No. LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017	(437.108.198)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(437.108.198)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>(392.684.198)</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>235.602.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(53.999.790)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>181.602.210</b>

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam face Neraca PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 Unaudited yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada face Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-358 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2018 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap.

Aset Tetap Lainnya  
Rp382.506.987

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp382.506.987 dan Rp306.151.787 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya antara lain buku-buku perpustakaan dan lukisan.

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 89.756.500 seluruhnya berasal dari Belanja Modal Lainnya yang sudah terealisasi berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dijelaskan pada Tabel 26.

Tabel 26  
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>306.151.787</b>
<i>Mutasi tambah tahun 2019:</i>	
+ Realisasi Belanja Modal Lainnya	89.756.500
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>89.756.500</b>
<i>Mutasi kurang tahun 2019:</i>	
- Reklasifikasi ke Persediaan	(13.401.300)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(13.401.300)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>76.355.200</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>382.506.987</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(22.552.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>359.954.487</b>

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp116.051.858.306

#### C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp116.051.858.306 dan Rp107.407.386.910. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dijelaskan pada Tabel 27.

**C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)**

Tabel 27  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2019	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2019
1	Tanah	233.761.358.040	-	233.761.358.040
2	Peralatan dan Mesin	146.478.871.735	(101.997.535.400)	44.481.336.335
3	Gedung dan Bangunan	224.201.982.974	(13.977.770.616)	210.224.212.358
4	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	(53.999.790)	181.602.210
5	Aset Tetap Lainnya	382.506.987	(22.552.500)	360.954.487
	<b>Jumlah</b>	<b>605.060.321.738</b>	<b>(116.051.858.306)</b>	<b>489.008.463.430</b>

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap.

Aset Lainnya  
Rp17.425.093.324

**C.3 Aset Lainnya**

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 17.425.093.324 dan Rp 8.035.763.875 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa software ataupun aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya untuk operasional pemerintah. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan dijelaskan pada Tabel 28.

**C.3 Aset Lainnya (lanjutan)**

Tabel 28  
Rincian Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2019 dari 2018  
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	37.044.447.353	23.821.857.738	13.222.589.615	56,51
2	Aset Lain-Lain	4.336.379.891	3.107.133.503	1.229.246.388	39,56
<b>Jumlah</b>		<b>41.380.827.244</b>	<b>26.928.991.241</b>	<b>14.451.836.003</b>	<b>53,87</b>
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi					
Aset Lainnya		(23.955.733.920)	(18.893.227.366)	(5.062.506.554)	26,80
<b>Aset Lainnya</b>		<b>17.425.093.324</b>	<b>8.035.763.875</b>	<b>9.389.329.449</b>	<b>116,84</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp37.044.447.353

**C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)**

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa software maupun anti virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp37.044.447.353 dan Rp23.821.857.738.

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud (ATB) dijelaskan pada Tabel 29.

Tabel 29  
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud  
Tahun 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>23.821.857.738</b>
<b>Mutasi tambah tahun 2019:</b>	
Realisasi Belanja Modal Lainnya	14.546.012.503
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>14.546.012.503</b>
<b>Mutasi kurang tahun 2019:</b>	
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1.323.422.888)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(1.323.422.888)</b>
<b>Total Mutasi Tambah (Kurang)</b>	<b>13.222.589.615</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>37.044.447.353</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(20.942.776.917)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>16.101.670.436</b>

Penambahan ATB yang berasal dari Belanja Modal Lainnya, antara lain untuk pengadaan software pengembangan aplikasi di PPATK, pembelian lisensi baru, dan pemberian Aset Tak Berwujud Lainnya. Pengurangan ATB dilakukan sebagai tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 terkait ATB yang sudah tidak digunakan, sehingga dilakukan reklasifikasi ke dalam ATB yang sudah Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan selanjutnya akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan atas ATB yang tidak digunakan tersebut.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.942.776.917.

Aset Lain-lain  
Rp4.336.379.891

**C.3.2 Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp4.336.379.891 dan Rp3.107.133.503. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan dan dalam proses penghapusan. Aset Lain-lain yang terdapat di PPATK per 31 Desember 2019 seluruhnya merupakan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan dan selanjutnya akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan atas ATB yang tidak digunakan tersebut.

Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp23.955.733.920

**C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp23.955.733.920 dan Rp18.893.227.366.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dijelaskan pada Tabel 30.

**Tabel 30**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2019**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Aset Lain-Lain	Nilai per 31 Desember 2019	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku per 31 Desember 2019
1	Aset Tak Berwujud	37.044.447.353	(20.942.773.917)	16.101.670.436
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	4.336.379.891	(3.012.957.003)	1.323.422.888
Jumlah:		41.380.827.244	(23.955.733.920)	17.425.093.324

**KEWAJIBAN**

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp845.274.066

**C.4. Kewajiban Jangka Pendek**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp845.274.066 dan Rp150.002.814. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dijelaskan pada Tabel 31.

**Tabel 31**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**  
**Per 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Uang kepada Pihak Ketiga	810.626.383	144.780.102	665.846.281	459.90
2	Uang Yang Belum Dicajikan	-	-	-	-
3	Pendapatan Diterima Di-tukar	17.868.418	3.820.330	14.040.088	363.74
4	Uang Muka KPPN	16.777.287	1.394.382	15.382.905	1.103.21
	Jumlah	845.274.066	160.002.814	685.271.252	463.51



Utang Kepada Pihak Ketiga  
Rp810.628.363

#### C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga adalah belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp810.628.363 dan Rp144.780.102.

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Rp458.546.358.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Rp322.082.005.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

#### C.4.2 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan adalah utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka Rp17.868.416

#### C.4.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.868.416 dan Rp3.828.330.

Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp17.868.416 merupakan jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berdasarkan kontrak sewa lahan untuk penempatan mesin ATM dengan Perjanjian Sewa antara PPATK dengan BRI Cab. Veteran Jakarta untuk masa sewa 1 Juni 2019 s.d. 31 Mei 2021 (2 Tahun) sebesar Rp25.226.000 dengan nomor referensi NTPN. 6397A48VU0GKKJ1S dan nomor kontrak PERJ-01/PL.03.03/PPATK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan masa sewa 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021.

Uang Muka KPPN  
Rp16.777.287

#### C.4.4 Uang Muka KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp16.777.287 dan Rp1.369.382.

46

**EKUITAS**

**Ekuitas**  
Rp.509.859.880.893

**C.5 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp509.859.880.893 dan Rp252.540.258.582. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan Negara  
Bukan Pajak**  
Rp.53.673.413

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp53.673.413 dan Rp47.416.635. Total PNBP PPATK Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp53.673.413 berasal dari:

1. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan yang digunakan untuk ATM BRI di Lingkungan PPATK berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor B/52/PL.04.01/V/2016 tanggal 6 Mei 2016 antara PPATK dengan PT Bank BRI Cabang Veteran untuk masa sewa 1 Januari s.d. 31 Mei 2019 sebesar Rp3.828.330. Selanjutnya, terdapat perpanjangan masa sewa berdasarkan kontrak PERJ-01/PL.03.03/PPATK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk masa sewa 1 Juni 2019 s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.357.584.
2. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp42.487.499, antara lain:
  - a. Pencairan jaminan pelaksanaan (bank garansi) PT NKN untuk penyediaan pengadaan konsumsi diklat sebesar Rp22.875.000 di Satker 417654.
  - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan jasa internet sebesar Rp18.391.498.

Perbandingan Rincian Pendapatan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 32.

**Tabel 32**  
**Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

URAIAN	31 Desember	31 Desember	Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Rp	%
<b>Pendapatan PNBP Lainnya</b>				
Pendapatan Jasa				
Pendapatan atas Pengelolaan HMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	11.188.814	9.187.897	1.997.917	21,74
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	42.487.499	37.860.651	4.626.838	12,25
<b>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>53.673.413</b>	<b>47.038.658</b>	<b>6.634.755</b>	<b>14,10</b>

Beban Pegawai  
Rp82.237.823.707

#### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp82.237.823.707 dan Rp68.830.709.656. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 33.

Tabel 33  
Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan /Penurunan	
		Rp	Rp		%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	12.684.097.710	9.409.872.640	3.115.125.070	32,90
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	175.376	144.109	31.267	21,70
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	692.059.648	547.839.576	144.220.072	26,33
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	197.481.672	146.130.605	42.351.067	29,18
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	1.004.650.000	948.575.000	56.075.000	5,91
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	140.790.000	79.090.000	61.710.000	78,03
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	49.199.538	32.434.700	16.764.838	51,68
511126	Beban Tunjangan Beres PNS	588.297.690	476.075.200	113.192.490	23,83
511129	Beban Uang Makan PNS	2.124.229.000	1.893.545.750	430.683.250	23,42
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	395.090.000	533.820.000	138.170.000	30,45
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	2.290.700.400	1.940.248.000	250.452.400	13,08
511324	Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara	531.760.120	433.458.210	98.391.910	22,68
512111	Beban Uang Honor Tugas	11.017.518.210	8.768.846.833	2.250.672.377	25,67
512211	Beban Uang Lombur	220.013.000	348.765.000	(128.772.000)	(36,92)
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	50.107.791.313	43.414.555.033	6.693.236.280	15,42
<b>Total Beban Pegawai</b>		<b>82.237.823.707</b>	<b>68.830.709.656</b>	<b>13.407.114.051</b>	<b>19,48</b>

Terdapat kenaikan Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 19,48% dibanding Realisasi Beban Pegawai Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan Beban Pegawai antara lain disebabkan:

- a. Terdapat kenaikan Beban Gaji Pokok PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, alih status pegawai dipekerjakan menjadi pegawai tetap, penambahan pegawai dipekerjakan, pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ke-13 (Tiga Belas).
- b. Terdapat kenaikan Beban Pembulatan Gaji PNS karena penerimaan CPNS yang mengakibatkan meningkatnya pembulatan Gaji.
- c. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Suami/Istri PNS antara lain karena penambahan CPNS dan perubahan status pernikahan PNS.
- d. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Anak PNS, antara lain karena penerimaan CPNS dan penambahan tanggungan PNS.

46,

**D.2. Beban Pegawai (lanjutan)**

- e. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Struktural PNS, antara lain karena pengangkatan pejabat struktural baru.
- f. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Fungsional PNS karena perambahannya jumlah pegawai yang menerima tunjangan fungsional untuk Pranata Komputer, Pranata Humas, dan Auditor.
- g. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan PPh PNS, karena bertambahnya jumlah pegawai yang mengakibatkan meningkatnya tunjangan PPh.
- h. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Beras PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, penambahan pegawai dipekerjakan dan tambahan tanggungan PNS.
- i. Terdapat kenaikan Beban Uang Makan PNS antara lain karena penerimaan CPNS, alih status pegawai dipekerjakan menjadi pegawai tetap, dan penambahan pegawai dipekerjakan.
- j. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan Umum PNS, antara lain karena penerimaan CPNS, alih status pegawai dipekerjakan menjadi pegawai tetap, penambahan pegawai dipekerjakan, pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 (Tiga Belas).
- k. Terdapat kenaikan Beban Gaji Pokok Pejabat Negara karena kenaikan penghasilan dan fasilitas pimpinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, perhargaan dan hak-hak lain bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Selain itu, terdapat pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji Ke-13 (Tiga Belas) kepada Kepala dan Wakil Kepala PPATK.
- l. Terdapat kenaikan Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara karena kenaikan penghasilan dan fasilitas pimpinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, perhargaan dan hak-hak lain bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Selain itu, terdapat pembayaran Tunjangan Hari Raya dan tunjangan Ke-13 (Tiga Belas), sehingga Beban Tunjangan PPh meningkat.
- m. Terdapat Beban Uang Honor Tetap untuk pembayaran honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- n. Terdapat kenaikan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) karena penerimaan CPNS, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Khusus Ke-13 (Tiga Belas).

Beban Persediaan  
Rp3.750.619.452

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.750.619.452 dan Rp3.320.951.611.

Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dan dijelaskan pada Tabel 34.

**D.3 Beban Persediaan (lanjutan)**

**Tabel 34**  
**Perbandingan Rincian Beban Persediaan**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp.	%	Rp.	%
590111	Beban Persediaan Konsumsi	3.612.184.857	3.145.851.780	466.333.072	14,82
590121	Beban Persediaan pita cukai meterai dan leges	8.592.000	5.796.000	2.796.000	48,24
590131	Beban Persediaan Bahan Baku	9.703.325	25.339.570	(15.631.345)	(61,59)
590149	Beban Persediaan Lainnya	120.134.270	143.964.156	(23.829.886)	(16,56)
<b>Total Beban Persediaan</b>		<b>3.760.619.452</b>	<b>3.320.951.611</b>	<b>429.667.841</b>	<b>12,84</b>

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, terdiri dari:

- a. Beban Persediaan Konsumsi, antara lain barang cetakan, alat tulis kantor, dan perlengkapan pemeliharaan.
- b. Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges, berupa beban atas penggunaan meterai Rp3.000 dan meterai Rp6.000.
- c. Beban Persediaan Bahan Baku, yaitu beban atas penggunaan bahan bakar solar untuk pemeliharaan peralatan dan mesin (penggunaan genset).
- d. Beban Persediaan Lainnya, merupakan beban atas penggunaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi

Beban Barang dan Jasa  
Rp45.973.335.150

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp45.973.335.150 dan Rp39.891.857.609. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 35.

**Tabel 35**  
**Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp.	%	Rp.	%
<b>Beban Barang</b>					
521111	Beban Kepatuhan Perkantoran	854.494.848	709.751.907	145.742.711	20,56
521113	Beban Penumbuhan Daya Tahan Tubuh	208.653.501	125.271.968	83.381.542	66,56
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	205.418.344	190.899.888	24.528.466	13,56

**D.4. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)**

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/Penurunan:	
				Rp.	%
521116	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31.150.000	-	31.150.000	-
521118	Beban Barang Operasional Lainnya	1.101.546.038	662.803.768	538.742.270	85,71
521211	Beban Bahan	3.329.543.082	3.613.047.718	(283.404.634)	(7,64)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	369.400.000	301.000.000	17.600.000	4,61
521218	Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.271.430.753	6.085.982.542	5.205.489.211	85,61
	Beban Jasa				
522111	Beban Langganan Listrik	3.774.227.356	3.116.877.128	657.250.228	21,08
522112	Beban Langganan Telepon	104.907.897	63.714.534	21.193.163	33,32
522113	Beban Langganan Air	9.221.595	12.178.290	(2.856.695)	(24,28)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.080.380.200	805.628.558	254.751.644	31,62
522131	Beban Jasa Konsultasi	887.246.000	3.716.328.000	(2.719.082.000)	(73,17)
522141	Beban Sewa	905.462.370	923.556.660	(18.094.190)	(1,96)
522151	Beban Jasa Profesi	1.448.320.000	1.307.240.000	141.080.000	10,79
522191	Beban Jasa Lainnya	20.101.796.356	18.243.730.641	1.858.065.715	10,18
536112	Beban Aset Elektromagnetik Penabuhan dan Mesin	189.904.200	43.876.100	126.028.100	287,24
Total Beban Barang dan Jasa		45.073.335.150	39.891.857.609	6.081.477.541	15,24

Kenaikan Realisasi Beban Barang dan Jasa yang signifikan, antara lain terjadi pada:

- Kenaikan Beban Keperluan Perkantoran karena terdapat peningkatan keperluan sehari-hari perkantoran di Satker 417654.
- Kenaikan Beban Penambah Daya Tahan Tubuh, karena terdapat penambahan pegawai baru.
- Kenaikan Beban Pengiriman Surat Dinas Pos karena peningkatan frekuensi kegiatan dan koordinasi dengan menggunakan jasa pengiriman surat dinas ke luar kota.
- Kenaikan Beban Honor Operasional Satuan Kerja karena terdapat pembebasan pembayaran honor bendahara pengeluaran di Satker 453374 dan Satker 417654.
- Kenaikan Beban Barang Operasional Lainnya, antara lain karena terdapat pembayaran bantuan operasional untuk tenaga pengamamanan, pengemudi, protokol, ajudan, tenaga caraka, tenaga pengurus visa/paspor dinas, dan petugas penghubung pengurusan dokumen anggaran dan keuangan ke unit kerja.
- Kenaikan Beban Honor Output Kegiatan, antara lain karena terdapat pembayaran honor tim antara lain Tim Pelaksana Eksternal National Risk Assessment (NRA).
- Kenaikan Beban Non Operasional Lainnya, antara lain karena pembayaran iuran keanggotaan Indonesia di FATF sesuai Pre Acceptance Invoice Nomor DAF/D03386/80000279 tanggal 31 Mei 2019, dan pembayaran untuk perpanjangan lisensi aplikasi.
- Kenaikan Beban Langganan Listrik, antara lain karena peningkatan penggunaan listrik dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor dan kegiatan diklat di Satker 417654.

### B.2.2 Beban Barang (lanjutan)

- i. Kenaikan Beban Langganan Langganan, antara lain karena peningkatan penggunaan layanan telepon dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor.
- j. Kenaikan beban Daya dan Jasa Lainnya karena meningkatnya keperluan komunikasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional kantor.
- k. Kenaikan Beban Jasa Profesi karena peningkatan kegiatan sosialisasi yang menggunakan jasa narasumber.
- l. Kenaikan Beban Jasa Lainnya antara lain karena pengadaan jasa Professional Conference Organiser dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Egmont Group Meeting dan pengesahan kegiatan yang dibiayai oleh hibah. Kegiatan yang dibiayai oleh hibah yang sudah diserahterimakan dan disahkan terdiri dari:
  - 1) Hibah dari pemerintah Australia yang dilaksanakan melalui Kegiatan PPATK AUSTRAC Partnership Program (PAPP) sebagai kelanjutan dari Government Partnership Program Phase II (GPF II). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) pada 4 Desember 2017 dengan periode hibah selama 5 (lima) tahun sejak Maret 2018 s.d. Februari 2023 dan memiliki nomor NPH/Register SA 04.12.2017/231SV7CA tanggal 4 Desember 2017. Nilai hibah PROSPERA yang diterima PPATK untuk kegiatan selama 5 (lima) tahun sebesar AUD8,368.845. 3. Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah PROSPERA yang sudah diserahterimakan dan disahkan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar AUD1,608,080 atau Rp15.661.187.605.
  - 2) PPATK menerima hibah dari UNODC yang dilaksanakan melalui Kegiatan UNODC Country Programme I dengan periode hibah sampai dengan 31 Desember 2019 dan memiliki nomor register hibah 27SEPG3Y. Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah UNODC Country Programme I yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2019 sebesar USD181,583.08 atau Rp2.532.176.051.

Beban Pemeliharaan  
Rp5.868.885.990

### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.868.885.990 dan Rp4.298.868.083. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Bahan Bakar Minyak dan Peumas (BMP) dan

✓G,

**D.5 Beban Pemeliharaan (lanjutan)**

Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan suku cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 36.

**Tabel 36**  
**Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan**  
**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember	31 Desember	Kenaikan (Penurunan)	
		2019	2018	Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.960.268.353	2.387.326.208	(407.058.855)	(17,19)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.448.710.809	1.431.560.018	15.150.593	1,05
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.050.014.051	2.088.206.185	(18.191.134)	(0,88)
563113	Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	172.200.889	177.401.591	(5.200.723)	(2,93)
563114	Beban Persediaan Suku Cadang	129.042.659	108.944.987	17.097.872	15,69
696113	Beban Aset Eksstrakontabel Gedung dan Bangunan	113.649.253	-	113.649.253	-
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>		<b>6.868.886.990</b>	<b>6.153.426.957</b>	<b>(284.640.997)</b>	<b>(4,62)</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp28.031.058.326

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp28.031.058.326 dan Rp21.491.665.424. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 37.

**Tabel 37**  
**Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
		Rp	%		
524111	Beban Perjalanan Biasa	12.906.065.381	10.726.740.128	2.179.345.253	20,32
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	605.626.003	478.080.000	127.536.003	26,58
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.581.719.800	2.046.608.300	2.545.110.500	124,38
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.882.533.497	3.466.481.703	416.051.794	12,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6.045.083.645	4.773.744.293	1.271.349.352	26,63
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>28.031.058.326</b>	<b>21.491.665.424</b>	<b>6.539.392.902</b>	<b>30,43</b>

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas, disebabkan oleh:

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

- a. Kenaikan Beban Perjalanan Biasa karena peningkatan frekuensi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor serta kegiatan koordinasi internal antar satker di PPATK serta koordinasi dengan eksternal lainnya.
- b. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota karena peningkatan frekuensi kegiatan Sosialisasi, Seminar, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Asistensi kepada Pihak Pelapor, kegiatan pemeriksaan dan audit kepada Pihak Pelapor, dan koordinasi dengan eksternal lainnya.
- c. Kenaikan Beban Paket Meeting Dalam Kota karena PPATK menjadi tuan rumah kegiatan Egmont Group Meeting yang dilaksanakan pada 29 – 31 Januari 2019.
- d. Kenaikan Beban Paket Meeting Luar Kota peningkatan frekuensi kegiatan Sosialisasi, Seminar, dan Pelatihan kepada pihak pelapor dan anggota.
- e. Kenaikan Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri antara lain disebabkan:
  - 1) Menghadiri pertemuan/undangan Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka persiapan Indonesia untuk menjadi anggota FATF.
  - 2) Menghadiri pertemuan/undangan Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) dan Egmont Group antara lain dalam rangka membahas hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta meningkatkan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan di dunia.

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp25.454.613.029

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp25.454.613.029 dan Rp21.483.686.932.

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dijelaskan pada Tabel 38.

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi (lanjutan)**

**Tabel 38**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kesekian (Penurunan)	%
		Rp.			
581111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.737.763.421	13.324.466.730	2.383.293.691	17,89
581211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.975.333.681	4.639.824.110	35.490.471	0,72
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.745.250	21.107.600	(2.362.350)	(11,19)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.890	2.854.900	-	-
592115	Beban Amortisasi Software	4.748.330.681	3.184.017.888	1.564.312.793	48,66
592119	Beban Amortisasi Usenai	1.555.430	-	1.555.430	-
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	1.402.938	(1.402.938)	(100,00)
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		<b>25.454.613.029</b>	<b>21.483.686.932</b>	<b>3.970.926.097</b>	<b>18,48</b>

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penilaian kembali atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam *face* Neraca PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 *Unaudited* yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada *face* Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-358 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Koreksi Hasil Revaluasi Aset tetap di PPATK diungkapkan pada bagian F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap.

Pendapatan Pelepasan  
Aset Non Lancar  
Rp70.922.222

**D.8 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp70.922.222 dan Rp114.569.976.



Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp2.010.000	<b>D.9 Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b> Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang timbul dari Pelepasan Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.010.000 dan Rp1.394.126.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp616.113.990	<b>D.10 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp616.113.990 dan Rp198.228.039.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp178.925.872	<b>D.11 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp178.925.872 dan Rp54.188.193.
Surplus (Defisit) dari Laporan Operasional (Rp190.756.561.902)	<b>D.12 Surplus (Defisit) Laporan Operasional (LO)</b> Surplus dari kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp190.756.561.902) dan (Rp160.867.665.888).

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp252.540.258.562	<b>E.1. Ekuitas Awal</b> Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp252.540.258.562 dan Rp256.917.068.226.
Surplus(defisit) LO (Rp190.756.561.902)	<b>E.2. Surplus(Defisit) LO</b> Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah defisit sebesar (Rp190.756.561.902) dan (Rp160.867.665.888). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas  
Rp234.878.663.778

### E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berasal dari transaksi Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp234.878.663.778 dan Rp1.973.748.913.

Koreksi Atas Reklasifikasi  
(Rp406.766.943)

#### E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar (Rp406.766.943) terjadi karena terdapat Aset Tak Berwujud Lainnya yang harus dilakukan amortisasi. Agar dapat dilakukan amortisasi, maka Aset Tak Berwujud Lainnya harus direklasifikasi ke Software. Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Lainnya, terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud Lainnya dalam bentuk aplikasi SQL Server Standar sebesar Rp392.645.000.
2. Aset Tak Berwujud Lainnya dalam bentuk aplikasi pelaporan PPATK sebesar Rp14.121.943.

Selisih Revaluasi Aset  
Rp238.489.409.524

#### E.3.2. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp238.489.409.524

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
(Rp3.203.978.803)

#### E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 (Rp3.203.978.803).

Transaksi Antar Entitas  
Rp213.197.520.455

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain ditambah pengesahan hibah langsung. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp213.197.520.455 dan Rp154.517.107.311.

Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dijelaskan pada Tabel 39.

Tabel 39  
Rincian Transaksi Antar Entitas  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	195.695.169.459	137.888.666.568	57.796.512.891	41,92
313121	Diterima dari Entitas Lain	(673.487.890)	(348.336.888)	(325.148.022)	93,34
313211	Transfer Keluar	(7.524.370)	(113.456.523.064)	113.447.988.114	(99,99)
313221	Transfer Masuk	-	113.463.048.054	113.463.048.054	(100,00)
381131	Pengesahan Hibah Langsung	16.193.383.656	16.969.284.841	1.224.099.015	7,21
<b>Total Transaksi Antar Entitas</b>		<b>213.197.520.455</b>	<b>154.517.107.311</b>	<b>58.680.413.144</b>	<b>37,98</b>

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp195.685.169.459

#### E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 195.685.169.459 dan Rp137.888.656.568.

Diterima dari Entitas Lain (Rp673.487.690)

#### E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendaftaran PPATK yang melibatkan kas negara/Bendahara umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp673.487.690) dan (Rp348.338.868).

Transfer Keluar (Rp7.524.970)

#### E.4.3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Keluar yang terjadi di PPATK berupa transfer keluar gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT.

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar (Rp7.524.970) dan (Rp113.463.048.054). Tranfer Keluar per 31 Desember 2019 sebesar (Rp7.524.970) disebabkan oleh koreksi hasil revaluasi aset tetap yang seluruhnya dilakukan di Satker 453374, sehingga terjadi jurnal balik di Satker Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2019 untuk membatalkan Transfer Keluar yang sudah dicatat pada Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018.

Transfer Masuk Rp0

#### E.4.4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal PPATK. Transfer Masuk yang terjadi di PPATK berupa transfer masuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan jaringan karena adanya pemisahan catatan BMN di Satker Kantor Pusat dengan Satker Pusdiklat APUPPT sebagai upaya pengendalian catatan awal BMN di Satker Pusdiklat APUPPT yang baru mulai beroperasi pada tahun 2018. Transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0 dan Rp113.463.048.054.

Pengesahan Hibah Langsung Rp18.193.363.656

#### E.4.5. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung berupa barang dan jasa yang sudah diterima PPATK dan telah disahkan oleh KPPN Jakarta VI. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp18.193.363.656 dan Rp18.969.264.641.

Ekuitas Akhir  
Rp509.859.880.893

#### E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp509.859.880.893 dan Rp252.540.258.562.

### F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

#### F.1. Kegiatan Yang Dibiayai dari Hibah

Kegiatan yang dibiayai oleh hibah di PPATK terdiri dari:

##### 1. Hibah dari Pemerintah Australia

Hibah dari pemerintah Australia yang dilaksanakan melalui Kegiatan PPATK AUSTRAC Partnership Program (PAPP) sebagai kelanjutan dari Government Partnership Program Phase II (GPF II). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) pada 4 Desember 2017 dengan periode hibah selama 5 (lima) tahun sejak Maret 2018 s.d. Februari 2023 dan memiliki nomor NPH/Register SA 04.12.2017/23TSV7CA tanggal 4 Desember 2017. Nilai hibah PROSPERA yang diterima PPATK untuk kegiatan selama 5 (lima) tahun sebesar AUD8.368.845.

Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah PROSPERA yang sudah diserahterimakan dan disahkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar AUD2.057.053.60 atau Rp20.245.787.237, dengan rincian sebagai berikut:

- b. Periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2018 sebesar AUD448.973.60 atau Rp4.584.599.632.
- c. Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar AUD1.608.080 atau Rp15.661.187.605.

##### 2. Hibah dari UNODC

PPATK menerima hibah dari UNODC yang dilaksanakan melalui Kegiatan UNODC Country Programme I dengan periode hibah sampai dengan 31 Desember 2019 dan memiliki nomor register hibah 27SEPG3Y. Kegiatan di PPATK yang dibiayai dari hibah UNODC Country Programme I yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2019 sebesar USD181.583.08 atau Rp2.532.176.051.

#### F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan

#### F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dileksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai ekumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang Ekuitas pada Laporan Keuangan.

Berdasarkan Resume Inventarisasi dan Penilaian Nomor LHIP-0048/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 29 September 2017 dan LHIP-0050/WKN.07/KNL.04/2017 tanggal 6 Oktober 2017, telah dilakukan penilaian kembali atas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh PPATK yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Namun, hasil penilaian tersebut tidak disajikan dalam face Neraca PPATK per 31 Desember 2019, tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 Unaudited yang menyatakan bahwa penyajian revaluasi pada LKPP tahun 2017 bersifat tidak menyeluruh untuk satu kelompok aset, sehingga nilai BMN yang disajikan pada face Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tetap disajikan sebesar nilai perolehannya sampai dengan proses revaluasi selesai secara menyeluruh.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017 dinyatakan bahwa hasil revaluasi BMN yang telah disajikan dalam face LKKL Tahun

**F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)**

2017 perlu dilakukan koreksi melalui Satker Konsolidasi, sehingga dibentuk Satker Konsolidasi PPATK, sebagai berikut:

- Kode BA 078 – PPATK
- Kode Unit 55 - Konsolidasian PPATK
- Kode Satker 555078 - Konsolidasian PPATK
- Kode KPPN 555 – KPPN Konsolidasian
- Kode Jenis Kewenangan – Kantor Pusat (KP)
- Kode Wilayah 0199 – Kantor Pusat

Berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK Tahun 2017 yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited) Nomor NKF-078/13.a/R/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018 dilakukan koreksi yang dijelaskan pada Tabel 40, Tabel 41, dan Tabel 42.

**Tabel 40**  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Neraca  
Per 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Tanah	325.328.597.000	-	244.350.097.000	80.978.000.000
Gedung dan Bangunan	212.636.175.897	-	66.550.684.743	145.085.491.154
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	191.178.000	437.108.198	-	628.286.198
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.809.131.946)	1.002.053.446	14.119.900.881	(16.976.979.381)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(11.081.133)	-	267.001.608	(299.062.741)
<b>Jumlah</b>	<b>534.334.937.818</b>	<b>1.439.161.644</b>	<b>325.309.184.232</b>	<b>210.464.015.280</b>

**Tabel 41**  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Operasional  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.071.594.175	17.453.510	1.002.053.446	19.080.994.240
<b>Jumlah</b>	<b>20.071.594.175</b>	<b>17.453.510</b>	<b>1.002.053.446</b>	<b>19.080.994.240</b>

**Tabel 42**  
Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017  
(Dalam Rupiah)

Akun	Unaudited Tahun 2017	Koreksi		Asersi Final Tahun 2017
		Debet	Kredit	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	324.855.497.524	324.855.497.524	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>324.855.497.524</b>	<b>324.855.497.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN). Pemerintah memutuskan Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Penilaian kembali BMN akan disajikan setelah perbaikan dan hasilnya diterima oleh BPK.

Selanjutnya, sesuai dengan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited) Nomor NKF-075/PB.6/2019 tanggal 28 Maret 2019, telah disepakati bahwa nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan Keuangan PPATK tahun 2018 (audited) tidak menggunakan angka hasil penilaian kembali aset tetap.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN, terdapat koreksi atas jurnal penyesuaian pada Satker Konsolidasi yang menyebabkan perubahan pada Laporan Keuangan PPATK Tahun 2018 Audited. Jurnal Koreksi yang dilakukan di Satker Konsolidasi PPATK cijelaskan pada Tabel 43.

**Tabel 43**  
**Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi PPATK**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018**  
**(Dalam Rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.053.447)	-
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.002.053.447)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.053.446	
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi		1.002.053.446
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.578.510)	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		(16.578.510)
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	16.578.510	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16.578.510
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.002.021.059)	-
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(1.002.021.059)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.002.053.446	
391116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	-	1.002.053.446
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		

## F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	DEBIT	KREDIT
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	[16.578.510]	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(16.578.510)
291116	Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	16.578.510	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	16.578.510
	(S-305/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)	-	-
131111	Tanah	(14.765.778.000)	-
313211	Transfer Keluar	-	(14.765.778.000)
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
313211	Transfer Keluar	[4.480.600]	-
133111	Gedung dan Bangunan	-	[4.480.600]
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
313221	Transfer Masuk	(14.765.778.000)	-
131111	Tanah	-	(14.765.778.000)
133111	Gedung dan Bangunan	(4.480.600)	-
313221	Transfer Masuk	-	(4.480.600)
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
313221	Transfer Masuk	(7.524.970)	-
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	(7.524.970)
	(S-306/KN/2019 Tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian Data Jurnal Koreksi Take Out Revaluasi BMN)		
	<b>TOTAL</b>	<b>(29.409.478.972)</b>	<b>(29.409.478.972)</b>

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 *Unaudited*, sehingga nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 *Unaudited* merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2018.

Laporan Keuangan PPATK (BA078) Tahun 2019 *Unaudited* belum menyajikan nilai Aset Tetap sebagaimana LHIP tanggal 25 November 2019 karena sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 terdapat kendala teknis dalam proses pengolahan data BMN di Sistem Informasi Manajemen Aset negara (SIMAN) dan belum terdapat petunjuk teknis yang jelas

**F.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (lanjutan)**

mengenai jurnal koreksi hasil inventarisasi dan penilaian bagi Satker yang sudah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) Barang Milik Negara (BMN) Nomor LHIP-356 s.d. LHIP-358/WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019 dan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Revaluasi BMN Nomor NKF Revaluasi-078/32/KN.2/2020 tanggal 28 April 2020, Aset Tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK Tahun 2019 Audited merupakan nilai Aset Tetap hasil revaluasi tahun 2017-2019.

Penjelasan terkait Jurnal Koreksi Hasil Revaluasi Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2019 dijelaskan pada **Lampiran L - Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan PPATK (BA.078) Tahun 2019**.

4/6



**PPATK**

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120